



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA PELAKSANA TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN
PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KERJA
SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT*)

NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB BIDANG DAN SEKRETARIAT TIM NASIONAL
PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM
ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
(*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim
Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia
dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan
(*Organisation for Economic Co-operation and Development*),
perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan
dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja
Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic
Co-Operation and Development*) tentang Penanggung Jawab
Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan
Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi
dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and
Development*);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
106);

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA PELAKSANA TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT*) TENTANG PENANGGUNG JAWAB BIDANG DAN SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT*).

Pasal 1

Membentuk Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*) yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD.

Pasal 2

- (1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. mengoordinasikan, merundingkan, dan menggalang dukungan untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*)/OECD dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan dalam OECD pada bidang terkait;
 - b. mengidentifikasi, mengategorisasikan urutan prioritas, dan menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD pada bidang terkait;
 - c. menjadi *focal point* persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD pada bidang terkait;
 - d. melaksanakan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan akses (*accession roadmap*), termasuk penyusunan *Initial Memorandum*, pelaksanaan reviu-reviu teknis (*technical reviews*), dan prosedur yang ditetapkan oleh OECD dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD pada bidang terkait;
 - e. menyampaikan laporan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD kepada Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
 - f. menyusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD pada bidang terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD dalam rangka persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Bidang dibantu oleh Anggota.
 - (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang; dan
 - b. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Penanggung Jawab Bidang.

(4) Susunan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Susunan Penanggung Jawab Bidang dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD ini.
- (5) Perubahan terhadap susunan Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD.
- (6) Perubahan terhadap susunan Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diusulkan oleh Penanggung Jawab Bidang kepada Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lebih lanjut.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Tim Nasional OECD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan kesekretariatan bagi Tim Nasional OECD;
 - b. menjadi penghubung (*contact point*) terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. mengoordinasikan pertemuan sehubungan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam pelaksanaan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD;
 - e. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD dalam rangka persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana huruf e, Sekretariat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program antar bidang, serta melakukan pemantauan terhadap capaian tiap bidang.

(3) Sekretariat ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

(3) Sekretariat Tim Nasional OECD berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(4) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Nasional OECD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

3. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;

4. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;

5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; dan

9. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO.

Anggota ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- Anggota : 1. Asisten Deputi Kerja Sama
Ekonomi Multilateral,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
2. Kepala Biro Perencanaan,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
3. Kepala Biro Hukum dan
Organisasi, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian;
4. Asisten Deputi Perekonomian,
Kementerian Sekretariat
Negara;
5. Direktur Pembangunan,
Ekonomi, dan Lingkungan
Hidup, Kementerian Luar
Negeri;
6. Direktur Hukum dan Perjanjian
Ekonomi, Kementerian Luar
Negeri;
7. Kepala Pusat Strategi
Kebijakan Multilateral,
Kementerian Luar Negeri;
8. Kepala Pusat Kebijakan
Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Multilateral, Kementerian
Keuangan;
9. Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan II, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
10. Asisten Deputi Perdagangan,
Perindustrian, dan
Ketenagakerjaan, Sekretariat
Kabinet;

11. Wakil ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

11. Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO; dan
12. Sdri. Alia Karenina, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4

- (1) Mekanisme kerja Penanggung Jawab Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Penanggung Jawab Bidang dan Anggota melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. pertemuan dilakukan paling sedikit untuk membahas perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
 - c. dalam hal diperlukan pertemuan Anggota Bidang dengan Sekretariat, Direktorat, dan Komite OECD di Paris, perlu mendapatkan pertimbangan Ketua Sekretariat Tim Nasional OECD dalam rangka efektivitas koordinasi;
 - d. Penanggung Jawab Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan; dan
 - e. Penanggung Jawab Bidang menunjuk 1 (satu) Anggota Bidang untuk melaporkan hasil pertemuan dan perkembangan hal-hal terkait pelaksanaan tugas masing-masing Bidang kepada Sekretariat setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Mekanisme kerja Sekretariat Tim Nasional OECD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
 - a. Sekretariat Tim Nasional OECD melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan dilakukan paling sedikit untuk membahas perkembangan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Sekretariat Tim Nasional OECD;

c. Ketua ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- c. Ketua Sekretariat memberikan penugasan kepada Wakil Ketua dan Anggota untuk melakukan fasilitasi terhadap bidang tertentu;
- d. Wakil Ketua dan/atau Anggota melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Sekretariat Tim Nasional OECD; dan
- e. Ketua Sekretariat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Nasional OECD kepada Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 5

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Ombudsman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap bersifat independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, pemerintah asing, pakar, dan pihak lain yang terkait.

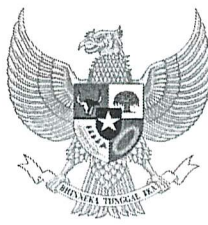
Pasal 7

Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD melaksanakan tugas terhitung sejak Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD ini ditetapkan sampai dengan diterimanya Indonesia secara resmi menjadi anggota OECD.

Pasal 8

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 9

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA

SELAKU

KETUA PELAKSANA TIM NASIONAL
PERSIAPAN DAN PERCEPATAN
KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM
ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI
DAN PEMBANGUNAN (*ORGANISATION
FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT*),

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP.197405071999031002



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA PELAKSANA TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN
KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI
DAN PEMBANGUNAN (*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT*)

NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG PENANGGUNG JAWAB BIDANG DAN SEKRETARIAT TIM
NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA
DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
(*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT*).

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB BIDANG DAN ANGGOTA
TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN (*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT*)

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
1	<i>Regulatory Policy Committee</i>	Kebijakan Regulasi	1. Menteri Sekretaris Negara; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;	1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara (Koordinator);

3. Menteri ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
			<p>3. Menteri Dalam Negeri; 4. Sekretaris Kabinet; 5. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan 6. Ketua Badan Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	<p>2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri; 3. Sekretaris Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; 6. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Kepala Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan</p>

8. Staf ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				8. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2	<i>Economic and Development Review Committee</i>	Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Koordinator); 2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

5. Staf ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				5. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (<i>Indonesian AID</i>); 7. Direktur Eksekutif, <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i> ; dan 8. Direktur, Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
3	<i>Committee on Fiscal Affairs</i>	Kebijakan Fiskal	Menteri Keuangan	1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Koordinator); 2. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;

3. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; 4. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4	<i>Committee on Financial Market</i>	Pasar Keuangan	1. Menteri Keuangan; dan 2. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.	1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Koordinator); 2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;

4. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				<p>4. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>5. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>6. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>7. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan</p>

8. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				8. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.
5	<i>Insurance and Private Pensions Committee</i>	Asuransi dan Dana Pensiun	1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan 2. Wakil Menteri Keuangan.	1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Koordinator); 2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

6. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; 7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; dan 9. Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
6	<i>Corporate Governance Committee</i>	Finansial dan Tata Kelola Perusahaan	1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 2. Menteri Badan Usaha Milik Negara.	1. Sekretaris, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Koordinator); 2. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi;

3. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				<p>3. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>4. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>5. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>6. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>7. Ketua Komite Nasional Kebijakan Governansi;</p>

8. Ketua ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				8. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan 9. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia.
7	<i>Trade Committee and the Working Party on Export Credits</i>	Perdagangan	Menteri Perdagangan	1. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (Koordinator); 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; 4. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;

5. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				5. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan; 7. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 8. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan 9. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
8	<i>Steel Committee</i>	Industri Baja	Menteri Perindustrian	1. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian (Koordinator);

2. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				2. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian; 3. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan; dan 5. Ketua Umum, Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
9	<i>Investment Committee and the Working Party on Responsible Business Conduct</i>	Investasi	1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 2. Menteri Perdagangan; dan	1. Sekretaris Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Koordinator); 2. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Wakil ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
			3. Wakil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	3. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal; 4. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian; 5. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan; 6. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan 7. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia.
10	<i>Regional Development Committee</i>	Pembangunan Regional	1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan	1. Sekretaris Utama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Koordinator);

Pembangunan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
			Pembangunan Nasional; dan 2. Menteri Dalam Negeri.	2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri; 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 5. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 7. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;

8. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 9. Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional; 10. Direktur Eksekutif, Komite Pemantuan Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan 11. Direktur Utama, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
11	<i>Committee on Digital Economy Policy</i>	Ekonomi Digital	1. Menteri Komunikasi dan Informatika; dan 2. Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional.	1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Koordinator); 2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

3. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				<p>3. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>4. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</p> <p>5. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Nasional;</p> <p>6. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan</p> <p>7. Ketua Umum, <i>Indonesian E-Commerce Association</i>.</p>

12. *Employment ...*



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
12	<i>Employment, Labour and Social Affairs Committee</i>	Ketenagakerjaan	Menteri Ketenagakerjaan	1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan (Koordinator); 2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan; 4. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

5. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				<p>5. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;</p> <p>6. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>7. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi;</p> <p>8. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan</p> <p>9. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia.</p>
13	<i>Education Policy Committee</i>	Pendidikan	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<p>1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Koordinator);</p> <p>2. Direktur ...</p>



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				<p>2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</p> <p>3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</p> <p>4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>5. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</p>

6. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				<p>6. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;</p> <p>7. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;</p> <p>8. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>9. Ketua Umum, Persatuan Guru Republik Indonesia;</p> <p>10. Sekretaris Umum, Pimpinan Pusat Muhammadiyah; dan</p> <p>11. Direktur Utama, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.</p>

14. *Committee ...*



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
14	<i>Committee for Scientific and Technological Policy</i>	Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional	1. Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (Koordinator); 2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional; 5. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan

6. Ketua ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				6. Ketua, <i>Centre for Technology and Innovations Studies</i> .
15	<i>Environment Policy Committee</i>	Lingkungan Hidup	1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Koordinator); 2. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				5. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 7. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional; 8. Direktur Eksekutif <i>Indonesian Nuclear Agency</i> , Badan Riset dan Inovasi Nasional; 9. Direktur Eksekutif <i>Indonesian Space Agency</i> , Badan Riset dan Inovasi Nasional; 10. Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup;

11. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				11. Direktur Utama, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan 12. Direktur Eksekutif, Yayasan Keanekaragaman Hayati.
16	<i>Chemicals and Biotechnology Committee</i>	Pengembangan Bioteknologi dan Pemanfaatan Kimiawi	Menteri Perindustrian	1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian (Koordinator); 2. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian; 3. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian; 4. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; dan 8. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
17	<i>Committee for Agriculture</i>	Pertanian	Menteri Pertanian	1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian (Koordinator); 2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;

3. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				<p>3. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;</p> <p>4. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;</p> <p>5. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;</p> <p>7. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;</p> <p>8. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi, Badan Pangan Nasional; dan</p> <p>9. Deputi Bidang Karantina Pertanian, Badan Karantina Indonesia.</p>

18. Fisheries ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
18	<i>Fisheries Committee</i>	Perikanan	Menteri Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Koordinator);2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;4. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;5. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;6. Deputi Bidang Karantina Ikan, Badan Karantina Indonesia; dan7. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

19. Health ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
19	<i>Health Committee</i>	Kesehatan	Menteri Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan (Koordinator);2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;4. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;5. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan; dan7. Ketua Umum, Ikatan Dokter Indonesia.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
20	<i>Public Governance Committee</i>	Tata Kelola Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;2. Kepala Ombudsman Republik Indonesia.3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Koordinator);2. Sekretaris Jenderal, Ombudsman Republik Indonesia;3. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;4. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;5. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;6. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Sekretaris Utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 9. Sekretaris Utama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara;

12. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				12. Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara; 13. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 14. Ketua Komite Nasional Kebijakan Governansi; dan 15. Direktur Eksekutif, The Prakarsa.
21	<i>Committee of Senior Budget Officials</i>	Penganggaran	1. Menteri Keuangan; dan 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan (Koordinator); 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

5. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; dan 7. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
22	<i>Committee on Statistics and Statistical Policy</i>	Statistik dan Data	Kepala Badan Pusat Statistik	1. Sekretaris Utama, Badan Pusat Statistik (Koordinator); 2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				<p>3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>4. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>5. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;</p> <p>6. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;</p> <p>7. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;</p> <p>8. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik;</p>

9. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				9. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik; 10. Inspektur Utama, Badan Pusat Statistik; dan 11. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
23	<i>Competition Committee</i>	Persaingan Usaha	1. Menteri Perdagangan; 2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan 3. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia.	1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan (Koordinator); 2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung; 3. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia; 4. Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi; 5. Sekretaris Jenderal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

6. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				<p>6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;</p> <p>7. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>8. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>9. Deputi Bidang Kajian dan Advokasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;</p> <p>10. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;</p> <p>11. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p>

12. Staf ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				12. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 13. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
24	<i>Working Group on Bribery in International Business Transactions</i>	Anti-Korupsi	1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 2. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia.	1. Deputi Bidang Informasi dan Data, Komisi Pemberantasan Korupsi (Koordinator); 2. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia; 3. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Agung; 4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
				5. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri; 6. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan 7. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
25	<i>Committee on Consumer Policy</i>	Perlindungan Konsumen	1. Menteri Perdagangan; 2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 3. Kepala Badan Standardisasi Nasional; dan	1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan (Koordinator); 2. Sekretaris Utama, Badan Standardisasi Nasional; 3. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan;

4. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
			4. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.	4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; 5. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 6. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan; 7. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan; 8. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 9. Sekretaris, Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

26. Council ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

NO	KOMITE OECD	BIDANG	PENANGGUNG JAWAB BIDANG	ANGGOTA BIDANG
26	<i>Council Working Party on Shipbuilding</i>	Industri Perkapalan	Menteri Perindustrian	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian (Koordinator);2. Sekretaris, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;3. Sekretaris Jenderal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;4. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian;5. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; dan7. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Demikian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Demikian susunan Penanggung Jawab Bidang dan Anggota Tim Nasional Persiapan dan Percepatan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*) yang berlaku efektif sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD ini.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA PELAKSANA TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN
PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM
ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN (*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT*),

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna

NIP.197405071999031002